

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
INTISARI.....	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Keaslian Penelitian.....	16
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Hukum Administrasi Negara	24
1. Beberapa Definisi Hukum Administrasi Negara.....	24
2. Fungsi Hukum Administrasi Negara	25
3. Tinjauan Umum Negara Indonesia Sebagai Negara Hukum (<i>Rechtsstaat</i>) dan Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>)	27
4. Perbuatan/Tindakan Pemerintah.....	28

B. Tinjauan Umum KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur	32
1. Sejarah Lahirnya KPBU	32
2. Definisi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) / <i>Public-Private Partnership</i> (PPP)	35
3. Kemanfaatan KPBU dalam Pembangunan Ekonomi	37
4. Konsep Pembagian Hak dan Kewajiban Dalam KPBU	38
5. BUMN/BUMD Sebagai Personifikasi Pemerintah dalam KPBU	40
C. Tinjauan Umum Asas/Prinsip Dalam Ilmu Hukum	41
D. Tinjauan Umum Prinsip Efektif dan Efisien dalam Penyediaan Infrastruktur	43
1. Efektif	43
2. Efisien	48
E. Tinjauan Umum Perjanjian	51
1. Perjanjian	51
2. Asas - Asas Perjanjian/Kontrak	52
3. Jenis-Jenis Perjanjian/Kontrak	55
F. Perkembangan Kontrak Konstruksi Sebagai Kontrak KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur di Indonesia	56
BAB III. METODE PENELITIAN	58
A. Jenis dan Sifat Penelitian	58
B. Bahan Penelitian	60
C. Jalannya Penelitian	61
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62

Infrastruktur Ketenagalistrikan dengan Skema EPC dengan <i>Deferred Payment</i> dan <i>Build, Maintain, and Transfer</i> (BMT).....	65
1. Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan oleh PT PLN (Persero)....	65
2. Latar Belakang Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan Jaringan Transmisi 500 kV di Wilayah Sumatera	68
3. Pertimbangan Pemerintah (PLN) Memperkenalkan Kontrak Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan dengan Skema EPC dengan <i>Deferred Payment</i>	72
a. Sebagai Upaya Untuk Mengurangi Beban Keuangan PLN.....	73
b. Upaya Mitigasi Risiko Dalam Proses Konstruksi	77
4. Pertimbangan Pemerintah (PLN) Memperkenalkan Kontrak Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan dengan Skema <i>Build, Maintain, and Transfer</i> (BMT).....	80
a. Sebagai Upaya Menjamin Kelancaran Operasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	81
5. Payung Hukum Kontrak dengan Skema EPC dengan <i>Deferred Payment</i> dan BMT dalam Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan.....	85
B. Perbandingan Efektivitas dan Efisiensi Kontrak dengan Skema EPC dengan <i>Deferred Payment</i> dan BMT Dalam Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan.....	90
1. Pemenuhan Prinsip Efektivitas Kontrak dengan Skema EPC dengan <i>Deferred Payment</i> dan BMT Dalam Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan	90



Analisis Yuridis Kontrak Pemerintah Dalam Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan Dengan Skema Engineering, Procurement, Construction (EPC) dengan Deferred Payment dan Build, Maintain, and Transfer (BMT) Studi Kasus Kontrak Pembangunan Jaringan Transmisi 500 kV PT PLN (Persero) di Wilayah Sumatera

LUTHFI KURNIAWAN, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D.

Universitas Gadjah Mada, 2023. Diunduh dari <http://repository.ugm.ac.id>

Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Gardu Induk 500 kV di Wilayah Sumatera.....	91
3. Perbandingan Efektivitas Skema EPC dengan <i>Deferred Payment</i> dan BMT Dalam Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan.....	92
4. Pemenuhan Prinsip Efisiensi Skema EPC dengan <i>Deferred Payment</i> dan BMT Dalam Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan.....	97
5. Perbandingan Efisiensi Skema EPC dengan <i>Deferred Payment</i> dan BMT Dalam Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan.....	97
BAB V. PENUTUP.....	102
A. KESIMPULAN.....	102
B. SARAN.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105



Analisis Yuridis Kontrak Pemerintah Dalam Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan Dengan Skema Engineering, Procurement, Construction (EPC) dengan Deferred Payment dan Build, Maintain, and Transfer (BMT) Studi Kasus Kontrak Pembangunan Jaringan Transmisi 500 kV PT PLN (Persero) di Wilayah Sumatera
LUTHFI KURNIAWAN, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam KPBU	40
Tabel 2. Rencana Pengembangan SUTET 500 kV Sumatera	71

Gambar 1. Spektrum Investasi dan Peran Pemerintah dalam KPBU.....	39
Gambar 2. Bentuk - Bentuk Kontrak Konstruksi.....	56
Gambar 3. Rencana Pembangunan Jaringan Transmisi 500 kV Sumatera	72
Gambar 4. Skema EPC dengan <i>Deferred Payment</i>	75
Gambar 5. Skema BMT Kerjasama Pembangunan Jaringan Transmisi	82

DAFTAR GAMBAR